

Tribun Pontianak

SABTU
21 JULI 2012

Predikat Ganjil WDP

TERBONGKARNYA dugaan korupsi proyek Hambalang Rp 2,5 triliun dan proyek Wisma Atlet, memantik pertanyaan besar terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pelaporan keuangannya.

"Ada hal yang dikecualikan BPK, sehingga tak dapat diyakini kewajarannya dalam

Laporan Keuangan (LK)," kata Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III, J Widodo H Mumpuni di Jakarta, kemarin.

Pengecualian pertama, BPK dalam LK Kemenpora adalah pemberian bantuan atau program Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp 2,6 triliun dengan jumlah penerima bantuan 2.829.

■ Bersambung ke Hal 7

Predikat Ganjil WDP

Sambungan Hal. 1

"Dari realisasi penyaluran bantuan tersebut, 1.857 penerima bantuan senilai Rp 1,8 triliun atau 71,05 persen tak menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuannya," tutur Widodo.

Pemantauan penggunaan dana bantuan belum dilakukan secara memadai oleh Kemenpora, sehingga realisasi penggunaan dana bantuan tak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK. Pengecualian LK ke dua, pengadaan realisasi perjalanan dalam negeri senilai Rp 234 miliar.

Menurut Widodo, terdapat ketidakpatuhan Kemenpora da-

lam mencairkan biaya perjalanan dinas karena tak didukung dokumen pertanggungjawaban sah sesuai ketentuan berlaku.

"Dukungan perjalanan dinas yang tersedia tak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai kewajaran atas realisasi belanja perjalanan tahun 2011," jelas Widodo.

Pengecualian BPK yang terakhir, atas LK Kemenpora adalah persediaan Rp 72,7 miliar. Dari persediaan itu terdapat persediaan Rp 2 miliar pada Sentra Pelayanan dan Rehabilitasi tak ditemukan titiknya, sehingga tak dapat diyakini ke-

wajarannya.

Widodo mengakui dalam penentuan opini WDP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tak memasukan kasus Hambalang dan Wisma Atlet Sea Games. Menurut Widodo saat BPK harus menyampaikan opini pemeriksaan terhadap kedua hal tersebut belum selesai, sehingga LK Hambalang dan Wisma Atlet dikeluarkan sementara, menunggu selesainya pemeriksaan BPK.

"Dalam laporan kami, tidak memasukan hal-hal menyangkut Hambalang dan Sea Games," ungkapnya. (tribunnews/adi)